

ABSTRAK

Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional merupakan pemerintahan tertinggi Gereja Katolik. Selama beberapa dekade, Tahta Suci dan Gereja telah di terpa kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh Pastor. Sebagai pihak yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, Tahta Suci juga harus ikut dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan Pastor dimana Tahta Suci mempunyai otoritas secara hierarki terhadap Pastor terlepas bahwa Tahta Suci mempunyai yurisdiksi terhadap Pastor tersebut ataupun tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah Tahta Suci mempunyai yurisdiksi terhadap pastor yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di luar Vatikan dan bagaimana upaya perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual yang dilakukan Pastor. Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder, dianalisis dengan metode interpretasi, dan disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahta Suci mempunyai hak otoritas terhadap pelayan Gereja Katolik, dalam kasus ini Pastor. Selain itu, Keikutsertaan Tahta Suci (Vatikan) dalam *The Convention On The Right Of Child* menimbulkan konsekuensi bahwa Tahta Suci sebagaimana halnya dengan negara lain yang ikut meratifikasimempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan isi konvensi. Simpulan dari penelitian ini yaitu Tahta Suci mempunyai kewenangan terhadap Pastor yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak tapi terbatas dalam konteks spiritual. Saran dalam penelitian ini yaitu Tahta Suci sebaiknya tetap ikut campur dalam menindaklanjuti penanganan kasus pelecehan yang dilakukan pastor dan jika bisa dibuat pengadilan regional untuk menangani kasus serupa, selain itu pihak berwenang di negara tempat dilakukannya kejahatan seksual harus mengusut tuntas kasus pelecehan sehingga tidak terjadi hal yang sama berulang kali.

Kata kunci : Yurisdiksi, Tahta Suci, Pastor, Pelecehan Seksual, Anak, Konvensi Hak Anak

ABSTRACT

The Holy See as the subject of international law is a supreme governmental of the Catholic Church. For decades, the Holy See and Church have been exposed to Priest's cases of sexual abuse of minors. As the party that ratified the Convention on the Rights of the Child, must also participate in efforts to provide protection for children who are victims of Priest's abuse which the Holy See also has hierarchically authority over the Priest despite of the Holy See has jurisdiction over the Priest who accused to does a sexual abused of minors or not. The objectives of this research are analyze whether the Holy See has jurisdiction over Priest who does sexual abuse of children outside the Vatican and how to protect children who have been sexually abused by priests. In an attempt to answer the problem, the writer used the normative juridical method. The data are obtained from secondary data, then analyzed with interpretation method and presented descriptively analysis.

The result of research shows that the Holy See has the right of authority over the servants of the Catholic Church, in this case the Priest. In addition, the participation of the Holy See (Vatican) in the Convention on the Right of Child has the consequence that the Holy See as well as other countries that ratified have the same obligation to carry out the contents of the convention. Conclusion of this research are that the Holy See has jurisdiction over Priest who does sexual abuse of minor, but are limited in a spiritual context. Suggestion of this research are that the Holy See must follow up on the handling of cases of harassment by priest and make a regional courts to handle the similar cases, in addition the country where sexual crimes are committed must thoroughly investigate the cases of abuse so the same thing does not happen repeatedly.

Keywords: Jurisdiction, Holy See, Priest, Sexual Abuse, Child, the Convention on the Rights of the Child